

**LKPJ DAN LPPD  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2022**

### INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kegiatan pemberian informasi rawan bencana, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana</li> <li>- Sosialisasi melalui media social dan wahana multimedia</li> <li>- Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public</li> </ul>	$\frac{14.067}{23.692} \times 100\% = 59,38\%$	Dokumen pendukung lampiran 1

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Trantibum Linmas	1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%	Dokumen pendukung lampiran 2
		1) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	1. Banjir (34,60 %) 2. Gelombang Ekstrim dan Abrasi (37,62%) 3. Gempa Bumi (100%) 4. Cuaca Ekstrim (3,28%) 5. Tanah Longsor (47,62 %) 6. Kekeringan (-) 7. Kebakaran Hutan dan Lahan (59,53%) 8. Tsunami (72,35%) 9. Gagal Teknologi (-) 10. Epidemilogi dan Wabah Penyakit (90%) 11. Konflik Sosial (-)	Dokumen pendukung lampiran 3

2. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga yang di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan, layanan puskalops dan peralatan perlindungan sesuai jenis ancaman bencana</li> <li>- Data yang diambil adalah data tahun 2021 berdasarkan program dan anggaran</li> </ul>	$\frac{12.846}{8.154} \times 100\% = 63,47\%$	Dokumen pendukung lampiran 4

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Trantibum Linmas	1)	Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%	Dokumen pendukung lampiran 5
		2)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%	Dokumen pendukung lampiran 6
		3)	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara di kawasan bencana}} \times 100\%$	73,44%	Dokumen pendukung lampiran 7
		4)	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	87,50%	Dokumen pendukung lampiran 8

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	62,40%	Dokumen pendukung lampiran 9
		6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	62,40%	Dokumen pendukung lampiran 10

3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yang dimaksud dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana</li> <li>- Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi korban bencana</li> </ul>	$\frac{60}{60} \times 100\% = 100\%$	Dokumen pendukung lampiran 11

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Trantibum Linmas	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$	100%	Dokumen pendukung lampiran 12
		2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah status penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	100%	Dokumen pendukung lampiran 13

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	100%	Dokumen pendukung lampiran 14
		4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	100%	Dokumen pendukung lampiran 15

Padang Tujuh, Januari 2023

**Kepala Pelaksana**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

  
**AZHAR S.Pd**

NIP. 19680803 198802 1 001

### BAB III

#### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

##### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	%			
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.227.771.944	2.858.072.448	88,55%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.688.035.944	2.348.218.095	87,36%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.512.530.944	2.179.868.095	86,76%			
				Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	84.500.000	80.250.000	94,97%			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.005.000	88.100.000	96,81%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.900.000	26.900.000	100%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.900.000	26.900.000	100%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.824.000	7.029.200	89,84%			
				Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.824.000	7.029.200	89,84%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.726.500	213.534.912	98,98%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.986.000	99,53%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.508.000	35.437.300	97,07%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	100%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.218.500	156.111.612	99,30%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.057.500	63.850.000	99,68%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.057.500	38.850.000	99,47%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.800.000	37.080.491	90,88%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000	37.080.491	90,88%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.428.000	161.459.750	87,55%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.738.000	142.348.750	89,68%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.290.000	18.046.000	74,29%	Karena adanya peralatan dan mesin yang jarang dipergunakan pada tahun berjalan, sehingga tidak diperlukan pemeliharaan pada tahun 2022		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.400.000	1.065.000	76,07%	Kegiatan gotong royong dilaksanakan sekali sebulan, sehingga dana untuk pemeliharaan halaman kantor tidak banyak		
				<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.554.011.025</b>	<b>1.074.522.895</b>	<b>69,15%</b>			
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten/Kota	172.013.200	71.384.660	41,50%			
				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	172.013.200	71.384.660	41,50%	Pembuatan Dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2022 tidak terlaksana karena Belum tersedia anggaran yang mencukupi dalam pembuatan dokumen sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang tersedia, sehingga kegiatan ini tidak terlaksana sesuai target indikator penyusunan dokumen		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	963.126.825	04.886.934	62,80%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	%			
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	963.126.825	604.886.934	62,80%	<p>1. BBM alat berat, honorarium operator alat berat dan pembantu operator alat berat bersisa disebabkan oleh alat berat excavator tidak bisa dipakai karena tidak ada biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat, Sebagian yang hanya bisa dimanfaatkan hanya back hoe, akibatnya belum semuanya puing-puing rumah dibersihkan.</p> <p>2. Dana konsultan tidak direalisasikan karena system kontraktual untuk pembangunan rumah rusak berat belum terlaksana</p> <p>3. Honorarium Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Monitoring dan Evaluasi tidak bisa realisasikan karena SK belum selesai/belum ditanda tangani bupati yang menjadi dasar untuk pembayaran honorarium tim tersebut.</p> <p>4. Honorarium Jitu Pasna tidak seluruhnya di realisasikan karena sebagian anggota tidak aktif dalam kegiatan</p>		
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	320.150.000	309.852.351	96,78%			
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	188.897.000	186.659.551	98,82%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						KEUANGAN	%			
				Pencarian, Petolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	45.590.000	41.000.800	89,93%			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85.663.000	82.192.000	95,95%			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	98.721.000	88.398.950	89,54%			
				Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	23.271.000	22.984.150	98,77%			
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	75.450.000	5.414.800	86,70%			

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Indeks Ketahanan Daerah	RPJMD	Mewujudkan Masyarakat yang aman dan tentram, dan Tangguh belandaskan ajaran agama dan nilai-nilai luhur

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pemerintah Daerah harus memiliki Kajian resiko bencana dan Peta Rawan bencana daerah sebagai mitigasi awal terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian akibat bencana alam	Untuk kegiatan pembuatan Dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2022 tidak terlaksana karena Belum tersedia anggaran yang mencukupi dalam pembuatan dokumen kajian resiko bencana dan daerah rawan bencana, secara georafis daerah kabupaten Pasaman Barat yang begitu luas, mempunyai Garis Pantai yang panjang, supermaket jenis bencana yang begitu kompleks dari 12 Jenis Bencana yang ada Disumatera Barat 11 jenis bencana ada dikabupaten Pasaman Barat, dengan demikian perlu pembahasan kompleks dalam pembuatan dokumen tersebut, untuk itu tahun anggaran 2023 dianggarkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang diperlukan dalam pembuatannya	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	Usulan Pengadaan alat pendeteksi gempa bumi	Untuk pengadaan alat pendeksi gempa bumi tahun anggaran 2022 belum di anggarkan karena : disamping harga alat ini sangat mahal belum tersedinya tenaga yang ahli yang bisa meoperasikan alat ini pada badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pasaman Barat, disamping itu merupakan locus kerja dan tanggung jawab dari BMKG dalam memberikan informasi kepada Instansi pemerintah dan masyarakat, dan Tahun anggaran 2023 BPBD Kab. Pasaman barat akan melaksanakan kerja Sama dengan BMKG mengenai, Edukasi, informasi Daerah Rawan Bencana di kab. Pasaman Barat secara kontiniu dan berkala	
3	Kami Rekomendasikan Penambahan Anggaran tidak terduga, sehingga apabila terjadi Bencana alam Pemerintah daerah sudah memiliki Anggaran Dalam massa tanggap darurat dan pasca bencana alam	Akan diusulkan kembali penambahan anggaran tidak terduga, apabila terjadi bencana alam, sudah tersedia anggaran saat tanggap darurat dan pasca bencana alam	
4	Pemerintah daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalin Komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dalam menyampaikan Proposal Permohonan anggaran Rekonstruksi bencana dalam memperbaiki rumah warga yang rusak akibat gempa, sehingga warga yang tertimpa	BPBD telah mensosialisasikan penerima bantuan rumah rusak berat sesuai surat keputusan. Akibat gempa sudah dilakukan pembangunan oleh aplikator, domus, kemudian masyarakat membangun sendiri (rembes mandiri) dan swakelola mandiri (Kerjasama dengan toko bangunan). BPBD memprioritas warga-warga yang tinggal di huntara. Kemudian pencairan uang bantuan bagi yang selesai atau	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1 (Tahun 2022)	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>dalam proses melalui mekanisme verifikasi lapangan (Tim Fasilitator dan Tim Teknis). Kendala Keterlambatan adalah terbatasnya indikator yang ada dari tenaga dan material serta toko yang bekerja sama dengan warga baru dalam penjajakan atau menunjukkan yang memfasilitasi wali nigari. Disamping adanya data-data ganda, tidak sesuai kategori dan ada juga yang tertinggal atau tercecer sehingga membutuhkan verifikasi lanjut.</p>	